



Perubahan KBLI Tahun 2025 Dan Implikasinya Terhadap Perizinan Usaha

Dalam sistem perizinan usaha di Indonesia, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) memegang peranan yang sangat penting. KBLI menjadi dasar utama dalam penentuan jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha serta menjadi acuan dalam proses perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Seiring dengan dinamika perkembangan ekonomi, teknologi, dan model bisnis, pemerintah secara berkala melakukan pembaruan terhadap KBLI. Perubahan KBLI terbaru membawa implikasi hukum dan administratif yang signifikan, khususnya bagi pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha sebelumnya.

Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai KBLI terbaru menjadi hal yang krusial untuk menghindari risiko hukum di kemudian hari.

KBLI Dalam Sistem Perizinan

KBLI merupakan sistem pengklasifikasian kegiatan ekonomi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan digunakan secara nasional. KBLI berfungsi untuk menyeragamkan pengelompokan jenis usaha agar memudahkan perencanaan, pengawasan, serta pemberian perizinan oleh pemerintah.

Dalam konteks perizinan usaha, KBLI memiliki fungsi antara lain:

- Menentukan jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha.
- Menjadi dasar penerbitan NIB melalui OSS.
- Menentukan tingkat risiko usaha (rendah, menengah, atau tinggi).
- Menjadi acuan dalam pemenuhan perizinan berusaha dan izin operasional.

Perubahan KBLI Terbaru

Peraturan terbaru mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah KBLI 2025, yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025. Peraturan ini resmi diundangkan pada 18 Desember 2025 untuk menggantikan KBLI 2020. Berikut adalah poin-poin penting dari peraturan terbaru ini:

- Masa Transisi: Pelaku usaha wajib menyesuaikan kode KBLI lama mereka ke KBLI 2025 paling lambat 17 Juni 2026 (6 bulan sejak ditetapkan). Setelah tanggal tersebut, kode KBLI lama tidak akan berlaku lagi dalam sistem perizinan.
- Akomodasi Ekonomi Baru: KBLI 2025 mencakup 22 kategori (A hingga V) dan menambahkan banyak kode baru untuk aktivitas ekonomi modern, termasuk konten kreator, *podcast*, kecerdasan buatan (AI), kripto, serta sektor ekonomi hijau dan digital.
- Integrasi Sistem: Perubahan ini akan diintegrasikan langsung ke dalam sistem OSS RBA (Online Single Submission) untuk menentukan tingkat risiko usaha dan persyaratan izin terbaru.

- Standar Internasional: Penyusunan KBLI 2025 mengacu pada *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)* Revisi 5 yang dirilis oleh PBB.
- Kewajiban Akta: Berdasarkan aturan pendukung (Perka BKPM No. 5 Tahun 2025), terdapat penekanan bahwa KBLI pendukung kini wajib dicantumkan dalam akta pendirian atau perubahan perusahaan.
- Dasar Statistik: KBLI 2025 akan menjadi basis utama bagi pemerintah dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Dampak KBLI Terhadap NIB, OSS, Dan Izin Usaha

Pembaruan KBLI secara langsung berdampak pada sistem OSS, khususnya dalam proses penerbitan dan pembaruan NIB serta izin usaha. KBLI yang tercantum dalam NIB harus mencerminkan kegiatan usaha yang dijalankan secara nyata.

Dampak yang dapat timbul antara lain:

- Perlunya penyesuaian KBLI bagi pelaku usaha yang sudah memiliki NIB.
- Perubahan tingkat risiko usaha yang berpengaruh pada jenis perizinan yang wajib dipenuhi.
- Penundaan atau penolakan izin operasional apabila KBLI tidak sesuai.
- Kewajiban pembaruan data usaha melalui OSS.

Risiko Hukum

Penggunaan KBLI yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha dapat menimbulkan berbagai risiko hukum dan administratif. Ketidaksesuaian tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha.

Beberapa risiko hukum yang dapat timbul antara lain:

- Pencabutan atau pembekuan izin usaha.
- Sanksi administratif dari instansi berwenang.
- Kesulitan dalam pengurusan perizinan lanjutan atau kerja sama bisnis.
- Potensi sengketa hukum akibat kegiatan usaha yang dianggap tidak berizin.

Pembelajaran Bagi Pelaku Usaha

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha terkait KBLI terbaru, antara lain:

- Selalu memeriksa kesesuaian KBLI dengan kegiatan usaha aktual.
- Melakukan pembaruan data melalui OSS jika terdapat perubahan KBLI.
- Memahami dampak perubahan KBLI terhadap tingkat risiko usaha.
- Berkonsultasi dengan pihak yang kompeten apabila terdapat keraguan.


Kesimpulan

KBLI terbaru membawa perubahan penting yang berdampak langsung terhadap sistem perizinan usaha di Indonesia. Ketepatan dalam memilih dan menyesuaikan KBLI menjadi faktor krusial dalam penerbitan NIB, pengurusan izin usaha, serta keberlangsungan kegiatan usaha secara hukum.

Ketidaksesuaian KBLI dengan kegiatan usaha dapat menimbulkan risiko hukum yang serius, sehingga pelaku usaha dituntut untuk lebih cermat dan proaktif dalam menyesuaikan perizinannya.

Dengan pemahaman yang baik terhadap KBLI terbaru, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda merupakan pelaku usaha yang menghadapi kendala perizinan, memerlukan pendampingan hukum terkait penyesuaian KBLI, NIB, OSS, maupun izin usaha, tim kami siap membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

 **08567572501**

 **info@justianlawfirm.com**

 **www.justianlawfirm.com**